

Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi: Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi Indonesia

Ni Komang Gita Sukmasanti

Universitas Mataram, Indonesia

gitasukmasanti403@gmail.com

ABSTRACT

Economic growth is an important indicator in assessing development success; however, its increase is not always followed by equal welfare distribution across regions. In Indonesia, disparities in unemployment, poverty, and the Human Development Index (HDI) still persist across 34 provinces during the 2020–2024 period. This condition indicates that economic growth has not been fully inclusive, making this study relevant to conduct. This study aims to analyze the effect of unemployment rate, poverty rate, and HDI on economic growth in 34 provinces of Indonesia, both partially and simultaneously. This research employed a quantitative approach using panel data and was analyzed through the fixed effect model. The results show that the unemployment rate and poverty rate have a negative and significant effect on economic growth, while HDI has a negative but insignificant effect. Simultaneously, all three variables have a significant effect on economic growth. These findings emphasize the importance of reducing unemployment and poverty in order to promote inclusive and sustainable economic growth.

Keywords : economic growth, unemployment, poverty, human development index, panel data.

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan, tetapi peningkatannya tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan antarwilayah. Di Indonesia, masih terdapat disparitas tingkat pengangguran, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 34 provinsi selama periode 2020–2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, sehingga penelitian ini relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dan dianalisis menggunakan model Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, IPM berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai F-hitung 36,59 dan koefisien determinasi sebesar 0,4521. Temuan ini menegaskan pentingnya pengurangan pengangguran dan kemiskinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, data panel.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan, tetapi peningkatan pertumbuhan tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan antarwilayah. Di Indonesia, perekonomian sempat mengalami kontraksi sebesar -2,07% pada 2020 dan kembali tumbuh menjadi 5,03% pada 2024, namun pemulihan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pembangunan yang merata. Disparitas antardaerah masih terlihat dari tingginya kemiskinan di kawasan timur Indonesia, seperti Papua yang mencapai 27,38% pada 2021 dan masih 18,09% pada 2024, serta Nusa Tenggara Timur sebesar 19,02% pada 2024. Di sisi lain, tingkat pengangguran juga masih relatif tinggi di provinsi-provinsi perkotaan seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, sementara capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan ketimpangan yang jelas antara wilayah barat dan timur Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menghadapi persoalan struktural berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kualitas manusia antarprovinsi.

Permasalahan utama penelitian ini terletak pada belum meratanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan sosial di tingkat provinsi. Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada wilayah tertentu, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bengkulu, Palangkaraya, atau Sorong, sedangkan penelitian lain menggunakan cakupan antarnegara ASEAN atau memasukkan kombinasi variabel yang berbeda. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam bentuk belum banyaknya kajian yang secara khusus menganalisis pengangguran, kemiskinan, dan IPM secara simultan pada 34 provinsi di Indonesia dalam periode terbaru 2020–2024, yaitu periode yang mencerminkan fase pemulihan pascapandemi dan dinamika pembangunan antarwilayah yang lebih mutakhir. Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga belum konsisten, terutama terkait arah dan signifikansi pengaruh IPM serta kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia periode 2020–2024, baik secara parsial maupun simultan. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian menggunakan cakupan nasional antardaerah yang lebih luas dan seimbang dibanding banyak studi sebelumnya yang hanya meneliti satu provinsi, kota, atau kawasan tertentu. Kedua, penelitian memanfaatkan periode 2020–2024 yang penting karena menggambarkan masa kontraksi, pemulihan, dan penyesuaian struktur ekonomi pascapandemi. Ketiga, penelitian ini menguji ketiga variabel utama tersebut secara bersama-sama dengan pendekatan data panel sehingga dapat menangkap variasi antarprovinsi sekaligus perubahan antarwaktu secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih kuat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengangguran cenderung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara kemiskinan dan IPM menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Izulhak Gimnastiar (2024) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh negatif signifikan, tetapi kemiskinan justru berpengaruh positif signifikan. Henky Mayaguez dkk. (2024) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif namun tidak signifikan, pengangguran berpengaruh negatif signifikan, dan kemiskinan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sementara itu, studi lain di tingkat daerah juga memperlihatkan hasil yang tidak seragam, terutama pada variabel IPM. Perbedaan temuan ini menguatkan argumen bahwa hubungan antara pengangguran, kemiskinan, IPM, dan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada cakupan wilayah, periode pengamatan, serta karakteristik struktural daerah yang diteliti. Oleh sebab itu, analisis pada 34 provinsi Indonesia selama 2020–2024 menjadi penting untuk memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara maupun daerah. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara berkelanjutan yang tercermin dalam kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari waktu ke waktu. Dalam naskah penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan persentase perubahan PDB/PDRB riil tahunan, sehingga dapat menunjukkan dinamika kinerja ekonomi antarprovinsi selama periode pengamatan. Dengan ukuran tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya merefleksikan peningkatan output, tetapi juga menjadi gambaran umum mengenai kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif.

Sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi memiliki posisi yang sangat penting karena sering dijadikan acuan untuk menilai apakah perekonomian suatu wilayah mengalami kemajuan atau perlambatan. Dalam skripsi Anda juga dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami kontraksi sebesar -2,07% pada 2020, lalu kembali tumbuh hingga 5,03% pada 2024. Meskipun demikian, pemulihan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan antarwilayah. Beberapa provinsi menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, sementara provinsi lain mengalami fluktuasi yang tajam. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat hanya dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari seberapa merata hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, urgensi pertumbuhan ekonomi menjadi semakin besar karena setiap provinsi memiliki struktur ekonomi, kapasitas

produksi, dan tingkat kesejahteraan yang berbeda. Data dalam penelitian ini menunjukkan adanya variasi pertumbuhan ekonomi yang cukup lebar antarprovinsi selama 2020–2024. Maluku Utara mencatat pertumbuhan sangat tinggi hingga 22,94% pada 2022, sedangkan Bali mengalami kontraksi terdalam sebesar -9,34% pada 2020 akibat tekanan pandemi pada sektor pariwisata. Di sisi lain, provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa cenderung lebih stabil pada kisaran sekitar 5 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh karakteristik wilayah masing-masing dan tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengangguran, kemiskinan, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi layak dijadikan fokus utama dalam analisis pembangunan regional.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator akhir untuk menilai keberhasilan pembangunan. Studi yang Anda rangkum menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-ekonomi, termasuk pengangguran, kemiskinan, dan IPM, meskipun arah dan signifikansinya tidak selalu konsisten. Izulhak Gimnastiar (2024) menemukan pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara kemiskinan justru positif signifikan dan IPM tidak berpengaruh. Henky Mayaguez dkk. (2024) menunjukkan pengangguran berpengaruh negatif signifikan, IPM positif namun tidak signifikan, dan kemiskinan positif tetapi tidak signifikan. Perbedaan hasil tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang relevan untuk diuji lebih lanjut dalam cakupan 34 provinsi Indonesia periode 2020–2024.

Berdasarkan uraian tersebut, pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Penempatan ini logis karena pertumbuhan ekonomi menjadi outcome utama yang mencerminkan hasil interaksi berbagai persoalan pembangunan antardaerah. Dengan demikian, analisis terhadap pertumbuhan ekonomi penting dilakukan untuk menjelaskan seberapa besar perubahan kondisi sosial-ekonomi mampu memengaruhi kinerja pembangunan regional di Indonesia.

Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pengangguran merupakan indikator ekonomi yang menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, tingkat pengangguran dipahami sebagai cerminan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian daerah. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar pula proporsi sumber daya manusia yang tidak terlibat dalam proses produksi. Kondisi tersebut menjadikan pengangguran tidak hanya sebagai masalah ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai persoalan pembangunan karena berkaitan langsung dengan efisiensi pemanfaatan faktor produksi dan kinerja ekonomi wilayah. Dalam konteks 34 provinsi Indonesia periode 2020–2024, pengangguran menjadi variabel penting

karena menunjukkan kemampuan masing-masing daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang produktif.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengangguran cenderung memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Izulhak Gimnastiar (2024) menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada lima kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil serupa juga ditemukan oleh Irawan dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palangkaraya. Selain itu, Henky Mayaguez dkk. (2024) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia 2014–2023 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil berbeda, seperti Celsi Oktanira (2023) di Jawa Timur yang menemukan bahwa pengangguran justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam konteks tertentu. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi tetap relevan untuk diuji kembali, khususnya pada cakupan nasional dengan periode yang lebih mutakhir.

Secara logis, tingkat pengangguran yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama. Ketika sebagian angkatan kerja tidak terserap, kapasitas produksi barang dan jasa menjadi tidak optimal. Akibatnya, output daerah menurun dan pertumbuhan ekonomi melambat. Selain itu, pengangguran juga menekan pendapatan masyarakat sehingga daya beli rumah tangga menurun. Penurunan konsumsi kemudian mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada akhirnya menekan produksi, investasi, dan ekspansi usaha. Dalam naskah Anda juga dijelaskan bahwa pengangguran tinggi mencerminkan ketidakefisienan pasar tenaga kerja dan memperlemah siklus pertumbuhan ekonomi melalui rendahnya produktivitas serta lemahnya permintaan agregat. Dengan demikian, secara teoretis dan empiris, peningkatan tingkat pengangguran cenderung diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi.

H1: Tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia.

Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam penelitian ini, kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Kemiskinan bukan hanya persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan

kerja. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, meskipun hasilnya belum sepenuhnya konsisten. Izulhak Gimnastiar (2024) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada lima kabupaten/kota di Jawa Barat. Berbeda dengan itu, Celsi Oktanira (2023) menunjukkan bahwa kemiskinan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Studi Celsi Oktanira (2022) pada negara-negara ASEAN juga menegaskan bahwa kemiskinan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Henky Mayaguez dkk. (2024) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2014–2023. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu diuji lebih lanjut pada konteks yang lebih luas dan periode yang lebih mutakhir, khususnya pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2020–2024.

Secara logis, tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung menekan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat miskin memiliki daya beli yang rendah sehingga konsumsi rumah tangga terbatas, padahal konsumsi merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan output ekonomi. Selain itu, kemiskinan juga berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan: pendapatan rendah menghambat tabungan dan investasi, rendahnya investasi menurunkan produktivitas, dan produktivitas yang rendah kembali mempertahankan kemiskinan. Akibatnya, aktivitas ekonomi berjalan kurang optimal dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Dalam konteks pembangunan daerah, tingginya kemiskinan juga menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar pula potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

H2: Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Unit analisis penelitian meliputi 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024, sehingga data yang digunakan berbentuk data panel, yaitu gabungan data time series dan cross section. Cakupan 34 provinsi dipilih karena memiliki ketersediaan data yang konsisten selama periode pengamatan, sedangkan empat provinsi baru di

Papua belum dimasukkan karena keterbatasan data runtut waktu. Dalam penelitian ini, populasi sekaligus sampel adalah seluruh 34 provinsi di Indonesia yang memenuhi kelengkapan data penelitian, sehingga teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh atau total sampling.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, serta sumber ilmiah lain yang relevan. Variabel dependen penelitian adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan persentase perubahan PDB/PDRB riil tahunan. Variabel independen terdiri atas tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan IPM. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Stata. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model yang paling sesuai. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pemilihan model, penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik dalam analisis regresi data panel. Pemilihan ini didasarkan pada hasil uji Chow dan uji Hausman yang sama-sama menunjukkan nilai probabilitas 0,0000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Selain itu, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas karena seluruh koefisien korelasi antarsesama variabel independen berada di bawah 0,8, dan juga bebas dari heteroskedastisitas karena nilai probabilitas uji Breusch-Pagan sebesar 0,0577, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model yang digunakan dinilai layak untuk menjelaskan pengaruh tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia periode 2020–2024.

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa persamaan model yang diperoleh adalah $\hat{Y} = 52,2576 - 2,75168X_1 - 0,971781X_2 - 0,337355X_3$. Persamaan ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen memiliki arah koefisien negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara statistik, tingkat pengangguran memiliki nilai Z-statistik -9,22 dengan probabilitas 0,0000, sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan memiliki nilai Z-statistik -2,87 dengan probabilitas 0,005, sehingga juga berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, IPM memiliki nilai Z-statistik -1,42 dengan probabilitas 0,158, yang berarti berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan oleh nilai F-hitung 36,59 dengan probabilitas 0,0000. Nilai R^2 sebesar 0,4521 menunjukkan bahwa 45,21 persen variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh pengangguran, kemiskinan, dan IPM, sedangkan sisanya 54,79 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Hasil pertama menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara substantif, koefisien

sebesar -2,75168 berarti setiap kenaikan pengangguran sebesar 1 persen cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 2,75 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi angkatan kerja yang tidak terserap, semakin rendah pula kemampuan daerah dalam menghasilkan output barang dan jasa. Pengangguran tidak hanya mencerminkan rendahnya pemanfaatan tenaga kerja sebagai faktor produksi, tetapi juga mengurangi pendapatan rumah tangga dan menekan konsumsi, padahal konsumsi merupakan salah satu komponen utama pembentuk pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, hasil ini logis karena provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi umumnya berada di wilayah perkotaan dan industri seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, yang sangat sensitif terhadap perlambatan aktivitas ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Izulhak Gimnastiar (2024), Irawan dkk. (2024), serta Henky Mayaguez dkk. (2024) yang sama-sama menemukan pengaruh negatif signifikan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, tujuan penelitian pertama telah terjawab, yaitu bahwa pengangguran merupakan faktor yang secara nyata menghambat pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

Hasil kedua menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien sebesar -0,971781 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kemiskinan sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,97 persen, ceteris paribus. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan hambatan struktural bagi pembangunan ekonomi. Masyarakat miskin umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, modal, dan peluang usaha, sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah. Di sisi lain, pendapatan yang terbatas membuat konsumsi rumah tangga hanya terfokus pada kebutuhan dasar, sehingga kontribusi terhadap permintaan agregat juga rendah. Akibatnya, ruang bagi peningkatan produksi, investasi, dan ekspansi ekonomi menjadi semakin sempit. Dalam konteks Indonesia, fakta bahwa tingkat kemiskinan tertinggi masih terkonsentrasi di kawasan timur seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan masih berkaitan erat dengan keterbatasan kapasitas ekonomi wilayah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Celsi Oktanira (2024) dan studi Alfairuzabady (2024) yang menegaskan bahwa kemiskinan cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Izulhak Gimnastiar (2024) dan Henky Mayaguez dkk. (2024) yang menemukan arah pengaruh kemiskinan positif atau tidak signifikan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pengaruh kemiskinan sangat dipengaruhi oleh cakupan wilayah, periode penelitian, dan karakteristik ekonomi daerah yang diteliti. Secara umum, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa penurunan kemiskinan merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Hasil ketiga menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara statistik, nilai probabilitas 0,158 menunjukkan bahwa perubahan IPM pada periode penelitian belum mampu

menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi secara meyakinkan. Temuan ini menarik karena secara teoritis kualitas manusia seharusnya mendorong produktivitas dan pertumbuhan. Namun, dalam penelitian ini peningkatan IPM tampaknya belum langsung diterjemahkan menjadi peningkatan output ekonomi. Salah satu rasionalisasi yang paling kuat adalah adanya time lag antara peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan hasil ekonomi yang muncul. Perbaikan kualitas manusia membutuhkan waktu sebelum benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan terserap di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Selain itu, struktur pasar tenaga kerja Indonesia juga menjadi faktor penting. Walaupun IPM meningkat, banyak tenaga kerja masih bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah, sehingga kualitas manusia yang lebih baik belum sepenuhnya tercermin dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan IPM tanpa dukungan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas belum cukup untuk mendorong pertumbuhan secara langsung. Temuan ini sejalan dengan Yusuf dkk. (2022) dan Tuasela (2023) yang juga menemukan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil ini berbeda dengan Maulida dkk. (2022) dan beberapa studi lain yang menunjukkan pengaruh positif signifikan. Menurut saya, perbedaan tersebut justru menegaskan bahwa IPM bukan variabel yang otomatis berdampak langsung pada pertumbuhan, melainkan sangat bergantung pada konteks struktural daerah, kualitas pasar kerja, dan horizon waktu pengamatan.

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi daerah tidak dibentuk oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh kombinasi kondisi pasar kerja, distribusi kesejahteraan, dan kualitas sumber daya manusia. Nilai R^2 sebesar 45,21 persen menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan penjelas yang cukup moderat. Artinya, hampir setengah variasi pertumbuhan ekonomi antarprovinsi dan antarwaktu dapat dijelaskan oleh tiga variabel tersebut. Namun, masih ada 54,79 persen variasi lain yang kemungkinan berasal dari investasi, belanja pemerintah, struktur industri, inflasi, perdagangan, infrastruktur, dan faktor eksternal lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dari sudut pandang penelitian, hasil ini menunjukkan bahwa model sudah cukup baik untuk menjawab tujuan utama penelitian, tetapi juga membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain agar penjelasan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengarah pada satu kesimpulan penting, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2020–2024 lebih sensitif terhadap persoalan pengangguran dan kemiskinan dibandingkan terhadap perubahan IPM dalam jangka pendek. Menurut saya, temuan ini sangat relevan dengan konteks pemulihan ekonomi pascapandemi, ketika daerah-daerah di Indonesia masih menghadapi tekanan pada pasar tenaga kerja dan ketimpangan kesejahteraan. Dalam situasi seperti itu, kebijakan yang berorientasi pada

penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan kemungkinan akan memberi dampak lebih cepat terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan pembangunan manusia yang efeknya cenderung jangka panjang. Meski demikian, IPM tetap penting sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Karena itu, implikasi praktis dari penelitian ini bukan berarti pembangunan manusia dapat diabaikan, melainkan harus dipadukan dengan strategi penciptaan kerja produktif agar peningkatan kualitas manusia benar-benar bisa diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi pengangguran, semakin rendah kemampuan daerah dalam menciptakan output ekonomi karena tenaga kerja sebagai faktor produksi tidak terserap secara optimal. Tingkat kemiskinan juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi hambatan nyata bagi pembangunan karena menekan daya beli, membatasi produktivitas, dan mempersempit aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, IPM berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti peningkatan kualitas manusia selama periode penelitian belum secara langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi antarprovinsi. Secara simultan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan output, tetapi juga harus diarahkan pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan sebagai persoalan struktural utama. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja produktif, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi juga lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baltagi, B. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. Third edition.
- Becker, G.S. 1993. *Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. In *Notes and Queries*.
- Celsi Oktanira. 2024. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN Tahun 2018-2022 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*.

- Fadillah, A. 2021. Marko ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia (analisis kemampuan pertumbuhan ekonomi dan indikator makroekonomi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia). *Islamic Science, Culture, and Social Studies*. 1(2).
- Fernando. 2019. Analisis pengaruh pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Lampung menurut perspektif ekonomi Islam (2011-2018). *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53(9): 1689–1699.
- Frisnoiry, S., Sihotang, H.M.W., Indri, N. dan Munthe, T. 2024. Analisis permasalahan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. 17(1): 365–374.
- Husnud Diniyah dan Fisabilillah, L.W.P. 2022. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Indonesia*.
- International Labour Organization. 2023. *World Employment and Social Outlook: Trends 2023*. International Labour Organization.
- Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Oentoro, Y.P. dan Yasin, M. 2024. Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan perkembangan perekonomian suatu negara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*. 2(3): 40–47.
- Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kurniawan, B., Sunarya, S.R., Naofal, F. dan Sudarjah, G.M. 2021. Indeks harga ekspor, inflasi, pengangguran serta pengaruhnya terhadap pendapatan nasional Indonesia dan Korea. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*. 1(3): 120–130.
- Maulania Rahma Azzahra, Zahra, S.K., Fauziah, J.R., Husna, H., Hilmy, L., Tanjung, D. dan Rivtryana, D.A. 2024. Pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat: periode tahun 2002-2023. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 2(3): 143–156.
- Minarni. 2021. Analisis pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah vs kebijakan fiskal Keynesian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Murni Asfia. 2006. *Ekonomika Makro*.
- Mualifah, N. 2019. *Dampak Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bumi Raharjo dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Putri, N.D., Pratama, L.S., Rumapea, E.O., Manurung, K., Simalango, F., Yumni, R., Kodratullah, M.L. dan Intadja, A.V. 2024. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan sesudah Covid-19. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. 7(3): 10374–10379.
- Samuelson, P.A. dan Nordhaus, W.D. 2021. *Ilmu Makro Ekonomi*.
- Sasmiharti, J. dan Karyati, E. 2024. Dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020-2021 (literature review). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*. 10(6): 3354–3360.

Economic Reviews Journal

Volume 5 Nomor 2 (2026) 714 – 725 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v5i2.1102

Sembiring, V.B.P. dan Sasongko, G. 2019. Pengaruh produk domestik regional bruto, inflasi, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Indonesia periode 2011–2017.